

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Realitas kehidupan Bangsa Indonesia saat ini dikawatirkan mengalami kemunduran dalam semangat nasionalisme yang merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia yang dulu dikenal dengan bangsa yang ramah, rukun, karena merasa senasib dan memiliki kesamaan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Namun kini lebih dikenal dengan bangsa yang mudah marah dan tersinggung, sehingga setiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita kerusuhan dan kriminal di mana-mana. Dengan demikian untuk menanamkan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat terhadap rasa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu melalui dunia pendidikan.

Pendidikan dituntut mampu menciptakan peserta didik memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Hal tersebut sangat *urgen* bagi masa depan bangsa dan negara, apabila peserta didik tidak memiliki jiwa nasionalisme tersebut, dipastikan krisis *disintegrasi* dan krisis *multidimensional* yang hingga kini berkecamuk akan sampai ke sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Selain itu pendidikan merupakan wadah untuk menuntut ilmu pengetahuan, pendidikan juga merupakan tempat menyiapkan dan melatih generasi bangsa yang merupakan calon pemimpin bangsa. Asep Mahpudz (1996:274) menyatakan bahwa kesadaran berbangsa pada masa pergerakan kemerdekaan ditandai dengan kesadaran bahwa.

Sesungguhnya berpendidikan yang baik dan keberanian intelektual dalam meyelami dan memahami secara kritis kondisi diri dari bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu dengan diawali kesadaran dalam pemikiran yang berupa peningkatan intelektual, maka kesadaran

Senalice Mara, 2013

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mecegah Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kebangsaan tumbuh dan berkembang untuk melepaskan diri dari kondisi keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan sebagai akibat dari penjajahan. Kesadaran kebangsaan yang tumbuh pada masa pergerakan ini, ternyata tidak saja berupa kesadaran intelektual tetapi terdapat kesamaan dalam bidang politik, sosial dan kultur. Lahirnya berbagai organisasi sosial politik pada masa pergerakan kemerdekaan merupakan bukti perjuangan dalam meraih kesamaan dalam bidang politik, ekonomi sosial maupun budaya. Kesadaran akan nasib dan kepentingan bersama menjelma menjadi kesadaran kebangsaan atau nasionalisme Indonesia.

Sehubungan dengan hal di atas bahwa telah terbukti betapa tingginya semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir dan melawan penjajah sejak awal penjajahan Belanda sampai dengan tercapai kemerdekaan Republik Indonesia merupakan refleksi kisah perjuangan. Sebuah kewajiban dimana generasi yang lebih tua agar tidak hanya mewariskan pengetahuan tentang tonggak sejarah atas kejadian yang terjadi dimasa lalu tentang semangat yang berpengaruh atas perjalanan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian akan tercipta suatu hubungan emosional secara timbal-balik diantaranya dalam kaitan semangat patriotisme dan nasionalisme. Hal ini menjadi sebuah tuntutan yang layak, agar generasi muda dapat menghargai jasa-jasa pejuang dan lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Muhammad (2012:14) menyelaskan potret

generasi muda Indonesia yang kian hari mengalami catatan kelam akibat perilaku dan kepribadian mereka yang tidak memiliki mental baja dalam menghadapi setiap persoalan yang muncul. Hal ini tentu saja menjadi ancaman yang serius bagi masa depan Indonesia, padahal sebagai generasi penerus kaum tua, generasi muda diharapkan menjadi pelipur lara dan pengobat dahaga atas persoalan yang menimpah bangsa Indonesia.

Hal ini pula yang dikatakan oleh Asep Mahpudz (1996:276) bahwa situasi sekarang sangat berbeda dengan situasi dan kondisi ketika masa pergerakan kemerdekaan.

**Senalice Mara, 2013**

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mecegah Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dimasa kini bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah yang kompleks dan multidimensi. Sebagai negara yang sedang berkembang, bangsa Indonesia harus terus berjuang keras agar dapat terampil secara terhormat dan bermartabat. Hal ini sebagai wujud untuk mengejar ketertinggalannya dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Ia juga menambahkan bahwa jika pembinaan kesadaraan berbangsa dan bernegara bagi segenap warga negara tidak diintensifkan, maka dikawatirkan rasa nasionalisme Indonesia semakin meluntur yang pada gilirannya dapat membahayakan eksistensi bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan.

Oleh karena Negara yang terbentuk dari kemajemukan, Indonesia sangat berpotensi untuk terjadinya disintegrasi. Maka generasi muda dituntut untuk memiliki pengetahuan dan memahami aneka ragam masalah dasar kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang akan diatasi dengan pemikiran berdasarkan Pancasila, dan UUD tahun 1945 serta memiliki jiwa nasionalisme yang mendalam agar disintegrasi bangsa dapat teratasi. Selanjutnya Al Araf dkk (2012:9). menyatakan bahwa

jika dibandingkan dengan semua Propinsi di Indonesia, Papua adalah salah satu tempat yang hingga kini masih dirundung konflik. Bahkan dari sejak awal menjelang Indonesia merdeka, tanah Papua sudah membawa polemik tersendiri dan menjadi topik bahasan khusus dikalangan elit negeri saat itu, dan parahnya hingga reformasi bergulir, konflik Papua tidak kunjung membaik.

Lebih lanjut Ottis Simopiarief (1984) mengungkapkan Faktor-faktor yang mendasari keinginan rakyat Papua Barat untuk memiliki negara sendiri yang merdeka dan berdaulat di luar penjajahan manapun yaitu hak, latar belakang sejarah, budaya dan realitas sekarang empat hal tersebut adalah :

**Pertama** Masyarakat Papua menganggap Kemerdekaan adalah “hak” berdasarkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration on Human Rights*) yang menjamin hak-hak individu dan berdasarkan Konvenant Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak-hak kolektif di dalam mana hak penentuan nasib sendiri (*the right to self-determination*) ditetapkan. »*All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political*

Senalice Mara, 2013

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mecegah Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*status and freely pursue their economic, social and cultural development* - Semua bangsa memiliki hak penentuan nasib sendiri. Atas dasar mana mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi dan budaya mereka» (*International Covenant on Civil and Political Rights, Article 1*). *Nation is used in the meaning of People (Roethof 1951:2) and can be distinguished from the concept State* Di Indonesia dikenal Daerah Istimewa Jogjakarta dan Daerah Istimewa Aceh. Pemerintah daerah-daerah semacam ini biasanya dilimpahi kekuasaan otonomi ataupun kekuasaan federal. Sayangnya, Jogjakarta dan Aceh belum pernah menikmati otonomi yang adalah haknya. **Kedua Budaya**. Rakyat Papua Barat, per definisi, merupakan bagian dari rumpun bangsa atau ras Melanesia yang berada di Pasifik, bukan ras Melayu di Asia. Rakyat Papua Barat memiliki budaya Melanesia. Bangsa Melanesia mendiami kepulauan Papua (Papua Barat dan Papua New Guinea), Bougainville, Solomons, Vanuatu, Kanaky (Kaledonia Baru) dan Fiji. Timor dan Maluku, menurut antropologi, juga merupakan bagian dari Melanesia. **Ketiga** Latarbelakang Sejarah. Kecuali Indonesia dan Papua Barat sama-sama merupakan bagian penjajahan Belanda, kedua bangsa ini sungguh tidak memiliki garis paralel maupun hubungan politik sepanjang perkembangan sejarah. Analisanya adalah sebagai berikut: **1)** Dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di bawah *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah perselisihan internasional (*international dispute region*). Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan sejarah. **2 )** Pernah diadakan plebisit (Pepera) pada tahun 1969 di Papua Barat yang hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) karena hanya merupakan hasil rekayasa pemerintah Indonesia. Adanya masalah Papua Barat di atas agenda Majelis Umum PBB menggaris-bawahi nilai sejarah Papua Barat di dunia politik internasional. Ketidaksetujuan beberapa anggota PBB dan kesalahan PBB dalam menerima hasil Pepera merupakan motivasi untuk menuntut agar PBB kembali memperbaiki sejarah yang salah. Kesalahan itu sungguh melanggar prinsip-prinsip PBB sendiri. **9)** Rakyat Papua Barat, melalui pemimpin-pemimpin mereka, sejak awal telah menyampaikan berbagai pernyataan politik untuk menolak menjadi bagian dari RI. **Keempat** Realitas Sekarang

Senalice Mara, 2013

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mecegah Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Rakyat Papua Barat menyadari dirinya sendiri sebagai bangsa yang terjajah sejak adanya kekuasaan asing di Papua Barat. Kesadaran tersebut tetap menjadi kuat dari waktu ke waktu bahwa rakyat Papua Barat memiliki identitas tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Di samping itu, penyandaran diri setiap kali pada identitas pribadi yang adalah dasar perjuangan, merupakan akibat dari kekejaman praktek-praktek kolonialisme Indonesia. Perlawanan menjadi semakin keras sebagai akibat dari (1) penindasan yang brutal, (2) adanya ruang-gerak yang semakin luas di mana seseorang dapat mengemukakan pendapat secara bebas dan (3) membanjirnya informasi yang masuk tentang sejarah Papua Barat.

Dari pemaparan di atas maka Pembinaan harus terus dilakukan kepada masyarakat Papua bahwa Papua bukan sebagai bangsa tetapi sebagai suku bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah Papua dan NKRI sama-sama adalah bekas jajahan Belanda, oleh karena itu pemahaman harus diberikan dari tingkat provinsi ke kabupaten sampai tingkat terdepan di kelurahan dan kampung-kampung, namun dalam pembinaan tentunya harus memiliki suatu pola penanganan pembinaan yang berkelanjutan. Sehingga semua instansi dan lembaga adat punya satu pemahaman yang sama, bahwa kita sudah merdeka dan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara masyarakat Papua juga. Walaupun dalam kenyataannya pembinaan tersebut belum membuahkan hasil yang optimal yaitu dengan masih terjadinya kekerasan di Papua yang kian hari semakin menjadi catatan kelam yang selalu menumpuk tanpa ada kejelasan yang pasti. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya sampaikan kapan konflik ini akan berakhir atau akan berkelanjutan bahkan terus memakan korban jiwa. Akar konflik di Papua sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik mengenai masalah *marjinalisasi* orang Papua, pelanggaran hak asasi manusia dan lain sebagainya. Keadaan ini terjadi karena masyarakat kurang percaya terhadap pemerintah daerah Papua maupun pemerintah pusat untuk menuntaskan masalah-masalah mendasar orang Papua sehingga wilayah di ujung timur nusantara ini masih terjadi konflik.

**Senalice Mara, 2013**

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mecegah Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kejadian-kejadian kecil terkadang dipakai untuk sebuah isu politik yang besar, karena semua kelompok sosial bersaing di Papua, seperti kepentingan global, pusat, TNI dan lokal. Hal-hal tersebut mengakibatkan keresahan sebab masyarakat Papua yang merasa tanah peninggalan nenek moyang mereka telah diambil oleh para penguasa, dan pendatang. Masyarakat asli Papua merasa kehilangan, diperparah lagi dengan transmigrasi dan pendatang lain yang jumlahnya sudah melebihi masyarakat asli Papua. Setelah pembebasan Irian Barat dan Papua menjadi bagian dari NKRI. Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah suatu negara yang merdeka. Didatangkanlah transmigrasi ke seluruh pelosok Papua pada tanggal 21 Februari 1902 oleh pemerintah *Nederlands Nieuw Guinea* yaitu mendatangkan orang-orang Jawa ke Merauke. Hingga pada tahun 1908 didatangkan lagi dari Jawa yang bermukim di Kuprik bersamaan dengan itu hadir pula masyarakat Timor dari Rote yang ditempatkan ke Merauke di lokasi Kampung Timor Merauke. tahun 1910 pemerintah Belanda mendatangkan lagi masyarakat Jawa dan dimukimkan di lokasi Spadem dan Mopah lama dan pekerja-pekerja lainnya sehingga dari segi jumlah telah terjadi pergeseran yang signifikan dan pekerja-pekerja lainnya sehingga dari segi jumlah telah terjadi pergeseran yang signifikan. <http://search.certifiedtoolbar.com/sejara+transmigrasi+di+papua> 4/12/2012)

Daerah Papua yang mayoritas penduduknya menganut agama kristen protestan. Namun hingga kini penganut agama lain sudah sejajar dengan agama kristen yang ada di Papua. Upaya penolakan terhadap pendatang terus dilontarkan oleh berbagai elemen masyarakat tetapi pemerintah tetap mengabaikan hal-hal itu, senada dengan hal tersebut Wonda (2009:127).

Menambahkan bahwa Otonomi khusus yang dianggap sebagai solusi akhir untuk masalah Papua telah dirancang oleh pemerintah dan beberapa orang terdidik Papua. Hal tersebut digambarkan dalam UU RI No. 21 tahun 2001. Implementasi di lapangan tidak sesuai dengan urat nadi dan

**Senalice Mara, 2013**

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mecegah Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

nafas otonomi khusus itu sendiri. Undang-undang yang dirancang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu segala prioritas untuk kepentingan orang asli Papua. Undang-undang otonomi khusus itu sendiri telah menjadi masalah dan belum mencapai penyelesaian.

Hal-hal seperti di atas tidak terlepas dari perhatian dan kesadaran generasi Pendidikan dituntut mampu menciptakan peserta didik yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Hal tersebut sangat *urgen* bagi masa depan bangsa dan negara, apabila peserta didik tidak memiliki jiwa nasionalisme tersebut, dipastikan krisis *disintegrasi* dan krisis *multidimensional* yang hingga kini berkecamuk akan sampai ke sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara

Pemerintah Indonesia berusaha meredam Ideologi Papua merdeka melalui Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus (OTSUS), namun undang-undang tersebut dinyatakan gagal, sehingga timbul sebuah rasa nasionalisme Papua bukan nasionalisme Indonesia. Dengan demikian perlu adanya sebuah upaya untuk membangun kembali nasionalisme terhadap Negara Indonesia yang sangat kita cintai ini. sebab jika tidak sangat dikawatirkan bahwa generasi mudah papua lambat laun akan kehilangan rasa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muhammad (2012:11) juga menyatakan bahwa :

Persoalan di atas semestinya tidak harus dilandasi dengan tindakan diskriminatif yang mengakibatkan korban berjatuh, akan tetapi bagaimana persoalan tersebut dapat dijadikan pelajaran dan memberikan kesadaran kepada semua elemen bangsa untuk mengedepankan semangat dialog dan konsolidasi bersama penyelesaian setiap persoalan yang muncul.

Bukti-bukti dekadensi moral dan lemahnya karakter anak bangsa sudah ada sejak lama. Lembaga pendidikan dan pemberdayaan masyarakat tidak terhitung jumlahnya dan melakukan upaya ke arah perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi hasilnya sebagaimana yang kita saksikan saat ini belum maksimal. Namun perlu kita sadari, bahwa membangun nasionalisme dan

**Senalice Mara, 2013**

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mecegah Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

patriotisme generasi muda yang lebih baik di masa depan memang tidaklah muda, tapi selama masih ada kesempatan tetap harus berusaha. Masa depan generasi muda juga sangat berpengaruh dari lingkungan mereka bergaul, jika lingkungannya saja sudah hancur, lalu seperti apa nantinya mereka di masa depan? Meskipun lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap masa depan generasi muda, bukan berarti kita menghindarkan mereka dari lingkungan tersebut. Kita bisa memperbaiki lingkungan tersebut, dalam suatu lingkungan yang baik terhadap lingkungan yang lainnya. Menurut Budimasyah (2002:11) bahwa

Anak adalah warga negara hipotek yakni warga negara yang belum jadi karena masih harus didik menjadi warga negara dewasa yang sadar akan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu masyarakat sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keinginan tersebut sebagai perhatian yang terus tumbuh, terutama dalam masyarakat demokrasi dewasa ini.

Sejalan dengan hal di atas sekolah memiliki peranan penting untuk mempersiapkan dan membentuk warga negara yang mempunyai rasa cinta terhadap bangsa sendiri. Selanjutnya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita pembangunan bangsa akan sungguh-sungguh mencintai bangsanya sendiri, dengan tidak membedakan setiap suku yang berdiam di bumi pertiwi, adanya rasa memiliki bangsa ini dan menjaga keutuhan Negara agar tidak terpeceh belah.

Masalah-masalah tersebut menarik untuk diteliti oleh penulis, yaitu tentang nasionalisme generasi muda (peserta didik) di SMA Negeri 1 Abepura. Peneliti ingin melihat sejauh mana peran PKn dalam menumbuhkan nasionalisme peserta didik. Para siswa SMA yang merupakan generasi penerus bangsa, diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang



Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dalam membangun rasa kebangsaan dan cinta tanah air kepada generasi muda serta bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

SMA Negeri 1 Abepura merupakan salah satu SMA tertua di Papua yang terletak pada Distrik Abepura kota Jayapura, juga disebut sebagai kota pelajar di tanah Papua dikarenakan Abepura terdapat berbagai macam perguruan tinggi dan sekolah. Abepura dan merupakan lokasi yang paling strategis untuk merancang berbagai isu sentral dalam pergolakan sosial politik di seantero Papua. Sering kali aksi yang terjadi di Abepura diikuti oleh masyarakat di seluruh Papua. Oleh karena itu, harus ada upaya yang dilakukan oleh sekolah agar peserta didik tidak terpengaruh dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Melalui observasi awal yang dilakukan oleh penulis bahwa untuk membangun nasionalisme peserta didik melalui mata pelajaran PKn, guru selalu berupaya menanamkan nasionalisme baik melalui pembelajaran maupun melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Agar peserta didik tidak terpengaruh oleh hal-hal yang akan merugikan mereka, dan peserta didik lebih jeli melihat kondisi sosial di sekitar lingkungannya, serta memiliki jiwa nasionalisme yang mendalam terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan pemaparan di atas Surakhmad (1990:53) menegaskan bahwa :

Adalah suatu fakta sejarah pembangunan umat yang akan memelihara

**Senalice Mara, 2013**

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mecegah Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keberlangsungan hidupnya untuk senantiasa menyerahkan dan mempercayakan hidupnya di dalam tangan generasi yang lebih muda. Generasi muda yang kemudian memikul tanggung jawab untuk tidak saja memelihara kelangsungan hidup umatnya tetapi juga meningkatkan harkat hidup tersebut. Apabila generasi muda yang seharusnya meneruskan tugas penulisan sejarah bangsanya tidak memiliki kesiapan dan kemampuan yang diperlukan, niscaya berlangsung ke arah kegersangan menuju kepada kekerdilan dan keterpurukan yang pada akhirnya sampai pada kehancuran. Oleh karena itu, kedudukan suatu angkatan muda dalam masyarakat adalah vital bagi masyarakat itu.

Dari pendapat di atas generasi muda mempunyai peranan penting dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu kesadaran awal yang harus kita tahu bahwa dalam penghayatan rasa kebangsaan dan cinta tanah air adalah kenyataan bahwa kita telah menjadi bagian tetap dari bangsa ini, bangsa Indonesia. Di sinilah tempat kita lahir, berpijak, hidup, bertumbuh dan berkembang, serta (mungkin saja) kita nanti akan menghembuskan nafas terakhir di tanah air ini. Bahkan, walaupun suatu saat kita meninggalkan negeri ini dan menetap di negeri lain, kita tidak akan pernah bisa meninggalkan identitas kita sebagai orang/bangsa Indonesia.

Menurut beberapa pandangan bahwa promosi dan penanaman nasionalisme menyediakan pendidikan kewarganegaraan dengan momentum yang kuat. Jika nasionalisme ditekankan dalam pendidikan kewarganegaraan, kita bisa memperkuat identitas nasional rakyat, rasa memiliki dan memperkuat supermasi kepentingan nasional. Hal itu mendorong kesadaran bahwa prestasi individu dan kegagalan terkait erat dengan naik turunnya bangsa. Kita bisa mempererat persatuan, harmoni, saling membantu, kesetaraan dan pembangunan antar ras. Dengan demikian memperkuat masyarakat atas kesadaran diri bahwa mereka harus menegakkan persatuan rasial, integritas nasional dan sosial stabilitas. Kita bisa mempromosikan kemerdekaan bangsa dan semangat yang konstan, sehingga memungkinkan orang untuk mengambil tantangan dalam

**Senalice Mara, 2013**

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mecegah Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berinovasi dan berusaha untuk mendapatkan keunggulan. Sejalan dengan pemaparan di atas Asep Mahpudz (1996:281) mengatakan bahwa :

Untuk membangun nasionalisme generasi muda sebagai wujud pendidikan kewarganegaraan adalah ungkapan perasaan senasib sepenanggungan dalam lingkup bangsa dalam bentuk kepedulian dan kepekaan akan masalah-masalah yang dihadapi bangsa, termasuk di dalamnya masalah yang berkaitan dengan rasa solidaritas sebangsa dan setanah air. Setidaknya yang dibutuhkan adalah menyangkut aspek pembinaan nilai-nilai kepribadian dan aspek peningkatan nilai-nilai kepribadian dan aspek peningkatan pengetahuan wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, upaya pembinaan nasionalisme Indonesia pada masa sekarang selayaknya mengutamakan pandangan dan sikap antisipotoris, berupa pembinaan kemampuan untuk memperhitungkan perkembangan yang akan terjadi dimasa depan. Artinya dibutuhkan penanaman sikap menghadapi segala situasi baru yang belum pernah terjadi dalam kehidupan suatu masyarakat atau suatu bangsa.

Menurut Winataputra dan Budimansyah, (2007:155), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang mengajarkan tentang bagaimana seorang warga negara dapat bertanggung jawab dan menjadi warga negara yang baik. Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) merupakan salah satu bidang kajian yang mengembangkan misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "*value-basic education*". Konfigurasi atau sistem pendidikan kewarganegaraan (PKn) dibangun atas dasar paradigma yakni :

*pertama*, PKn secara kurikuler dirancang untuk subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berahklak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab. *Kedua*, PKn sebagai teoritik dirancang sebagai subyek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi psikomotor, afektif dan kognitif yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep dan moral pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dalam bela negara. *Ketiga*, PKn secara programatik dirancang sebagai subyek pembelajaran yang menekan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai

perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, serta kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara.

Lebih lanjut, secara yuridis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional Undang-Undang No RI 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai landasan operasional, dan peraturan Menteri nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan (SKL). Sedangkan menurut (Wahab dan Sapriya 2011:278-279), pada pasal 37 ayat 1 dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan dan ayat 2 dikemukakan pula kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan sedangkan pada bagian penjelasan pasal 37 dikemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfungsi dalam pembentukan warga negara yang mampu memahami dan mempertahankan, serta melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang terampil, memiliki jiwa nasionalisme, serta cerdas seperti yang dirancang/diatur oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan dapat mendidik dan membina peserta didik serta memupuk jiwa nasionalisme secara mendalam, termasuk dapat memecahkan masalah konflik di lingkungan mereka berada. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan memegang peranan penting dalam pengajaran tentang resolusi konflik.

Laros Tuhutera (2010:12) juga menyatakan pendidikan kewarganegaraan diharapkan akan mampu membelajarkan siswa untuk memecahkan

**Senalice Mara, 2013**

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mecegah Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



masalah-masalah sosial bukan konvensional yang hanya menuntut siswa untuk menghafal fakta-fakta, yang hanya menggunakan metode ceramah yang membosankan siswa, ataupun pendidikan yang hanya sekedar mewariskan nilai-nilai lama tanpa dikaji secara kritis, dan juga bukan pendidikan yang hanya menekankan penguasaan disiplin ilmu dan pengembangan intelektualisme.

Disisi lain masih ditemukan pula berbagai kendala dalam pembelajaran PKn. Kendala-kendala tersebut yang dikemukakan oleh Winataputra dan Budimansyah (2007:118-119) antara lain;

- (1) Masukan instrumen (*instrumen input*) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru atau dosen serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar,
- (2) Masukan lingkungan (*invirentantal input*) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis.

Menurut Winata Putra (1999) Bahwa hasil analisis terhadap terhadap pengembangan PKn di Indonesia menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang mendasar pada tahapan paradigma sehingga mengakibatkan ketidakpastian, baik dalam tataran konseptual maupun tataran praktisi, setidaknya terdiri atas empat kelemahan yakni :

- (1) Kelemahan dalam konseptualisasi PKn, (2) Penekanan yang berlebihan pada proses behavioristik, tanggapan pada proses penanaman nilai yang cenderung indroktinatif (*values inculcarion*): (3) Ketidakjelasan terhadap penjabaran berbagai dimensi tujuan PKn kedalam kurikulum, dan (4) Keterisolasian proses pembelajaran dalam konteks disiplin dan keilmuan dan lingkungan sosial budaya.
- Selanjutnya untuk menyikapi kelemahan-kelemahan yang ada maka

Bertolak dari pendapat di atas Wahab dan Sapriya (2011: 44). mengusulkan pendidikan kewarganegaraan baru, sebagai tujuan utama, hendaknya dapat mengembangkan kompetensi warga negara (*civic competence*), ahlak warganegara yang diinginkan (*desirable personal qualities* atau *civic virtue*) dan budaya warganegara (*civic culture*), serta nilai dan kepercayaan

terhadap demokrasi (*democratic values and beliefs*) untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pandangan di atas bertujuan agar generasi muda memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara santun, jujur dan demokratis. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai, yang terkandung didalam Pancasila. Karena Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya, dan pendidikan kewarganegaraan sangat berperan penting untuk membina warga masyarakat, warga bangsa dan negara, secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang selalu berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasional, oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan berbagai dinamika.

Demikianlah Indonesia yang terdiri dari 17.000an pulau dan di dalamnya hidup berbagai suku bangsa yang sangat beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke, serta merupakan negara bekas jajahan dengan sistem otoriter dan militeristik yang menganut sistem demokrasi Pancasila, hal ini tidak bisa dipungkiri bangsa ini sangat rawan terhadap konflik. Konflik yang paling nyata adalah konflik horizontal, konflik antara masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Selama kurung waktu bertahun-tahun. Konflik tersebut menjadi suatu misteri yang belum mampu dipecahkan oleh pemerintah dan dalam menangani persoalan-persoalan tersebut pemuda juga mempunyai andil besar dalam merubah dan mencari solusinya. konflik-konflik lain yang sering terjadi di tanah air misalnya konflik di Kalimantan Barat, Poso, Sulawesi tengah, serta pergolakan daerah atau konflik vertikal yang menuntut

**Senalice Mara, 2013**

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mecegah Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang terjadi di Aceh dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk dapat mencegah terjadinya konflik. Pembelajaran PKn yang demikian diharapkan akan menyentuh hati dan batin setiap peserta didik, diharapkan mereka akan mengakui dan menghargai potensi individual, kelompok, daerah dengan mementingkan kebersamaan, karena selama ini pembelajaran PKn disajikan hanya bersifat pengetahuan saja. Hal ini mengakibatkan mata pelajaran PKn dianggap membosankan dan kurang peka terhadap masalah-masalah yang sedang terjadi sekarang ini. Integrasi bangsa saat ini sangat memprihatinkan. Sehingga mendorong penulis untuk dapat mengkaji lebih dalam tentang :

**Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mencegah Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri I Abepura Jayapura).**

**B. Rumusan Masalah**

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun Nasionalisme Untuk Mencegah Konflik di Papua, mengingat luasnya permasalahan tersebut, maka permasalahan tersebut perlu dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengembangan materi Pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan nasionalisme peserta didik di SMA Negeri 1 Abepura?
2. Bagaimana pengembangan media Pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan nasionalisme peserta didik di SMA Negeri 1 Abepura?
3. Metode apa saja yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi guna menumbuhkan nasionalisme peserta didik di SMA Negeri 1 Abepura?

**Senalice Mara, 2013**

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mencegah Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Apa saja kendala dalam memngimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhakn nasionalisme peserta didik di SMA Negeri 1 Abepura?
5. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan nasionalisme peserta didik di SMA Negeri 1 Abepura?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun nasionalisme agar dapat mencegah konflik di Papua dan bagaimana upaya guru dalam mengimplementasikannya.

#### **Secara Khusus, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :**

1. Mengetahui pengembangan materi Pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan nasionalisme peserta didik di SMA Negeri 1 Abepura?
2. Mengetahui pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan melalui media untuk menumbuhkan nasionalisme peserta didik di SMA Negeri 1 Abepura?
3. Mengetahui Metode apa saja yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik guna menumbuhkan nasionalisme peserta didik di SMA Negeri 1 Abepura?
4. Mengetahui kendala dalam memngimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhakn nasionalisme peserta didik di SMA Negeri 1 Abepura?
5. Mengetahui upaya untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan nasionalisme peserta didik di SMA Negeri 1 Abepura?

### **D. Manfaat Penelitian**

Senalice Mara, 2013

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mecegah Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara keilmuan (teoritik) maupun secara empirik (praktis).

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara keilmuan (teoritik), maupun secara empirik (praktis), secara teoritik penelitian ini akan menggali, mengkaji dan mengorganisasikan pengembangan pembelajaran PKn. Dalam rangka membangun nasionalisme melalui pendidikan kewarganegaraan.

### **2. Secara Praktis**

- a. Memberikan masukan kepada guru, sebagai peningkatan profesionalismenya terutama dalam membangun kebangsaan dan cinta tanah air kepada peserta didik.
- b. Memberikan masukan kepada Kepala sekolah dalam merumuskan dan meningkatkan mutu pembelajaran PKn terutama dalam membangun kebangsaan dan cinta tanah air kepada peserta didik yang merupakan generasi muda bangsa.
- c. Para akademisi atau komunitas akademis, khususnya dalam bidang PKn untuk bahan masukan kearah pengembangan PKn sebagai disiplin ilmu.
- d. Para pengembang kurikulum PKn baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi maupun lingkungan masyarakat.
- e. Para pengambil kebijakan terutama yang terkait dengan program PKn dalam upaya mempersiapkan warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

## **E. Penjelasan Konsep**

### **1. Peran**

Menurut Laros Tuhutera (2010:20), makna peran dari sudut pandang ilmu sosial berarti suatu tugas atau fungsi yang dibawakan seseorang, atau lembaga organisasi ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.

**Senalice Mara, 2013**

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mecegah Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 2. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebijakan dan budaya kewarganegaraan, dengan menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan yang secara koheren diorganisasi dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial kultur, dan kajian ilmiah kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan persekolahan (*civic school*), berada pada jalur pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan. Pada jalur pendidikan non formal yang menurut penjelasan pasal 37 UU No 23 Tahun 2003 dikembangkan sebagai muatan kurikulum yang berfungsi mengembangkan rasa kebangsaan, cinta tanah air, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kehidupan peserta didik pada dunia persekolahan pada dasarnya merupakan paradoksi untuk menyiapkan diri sebagai warga sekolah atau *school citizen*. (Winataputra, 2001:317).

## 3. Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu ideologi yang meletakkan bangsa dipusat masalahnya dan berupaya mempertinggi keberadaannya. Smith D, 2003 : 10).

Menurut **L. Stoddard**: Nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa.

## 4. Konflik

Lockwood (dalam Tamburaka, 1999:102) menyebutkan konflik adalah perselisihan atau permusuhan antara individu atau anatar kelompok dalam masyarakat karena ada kepentingan tertentu.

## 5. SMA Negeri 1 Abepura

Senalice Mara, 2013

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mecegah Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

SMA Negeri 1 Abepura Adalah salah satu SMA tertua di Papua. Letak sekolah ini berada di Jln. Biak. Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua.



**Senalice Mara, 2013**

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mecegah Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura)

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)